ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Isu Sosial Kontemporer: Dinamika Kesempatan Kerja, Pendapatan, Dan Kohesi Sosial Di Kawasan Perkotaan

Alimin Alwi[1],
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Indonesia
E-mail: alimin.alwi@unm.ac.id

Article History:
Received: 02 November 2026
Revised: 05 November 2026
Accepted: 06 November 2026

Keywords: *Isu Sosial Kontemporer, Sosial Ekonomi Budaya, Kesempatan Kerja, Kohesi Sosial, Masyarakat Perkotaan.*

Abstrak: *Perkembangan aktivitas dunia usaha di kawasan perkotaan tidak hanya membawa perubahan dalam struktur ekonomi, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial dan kehidupan budaya masyarakat di sekitarnya. Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika sosial ekonomi dan budaya masyarakat dalam menghadapi perkembangan aktivitas usaha, dengan menitikberatkan pada kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, partisipasi masyarakat, dan kohesi sosial. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data wawancara terhadap 35 responden, observasi lingkungan sosial, dan dokumentasi kegiatan operasional usaha. Hasil kajian menunjukkan bahwa aktivitas usaha memberikan kontribusi terhadap terbukanya kesempatan kerja dan berkembangnya kegiatan ekonomi lokal. Namun, manfaat ekonomi tersebut belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat mengenai pemerataan kesempatan kerja dan prioritas tenaga kerja lokal. Pada dimensi sosial budaya, masyarakat masih mempertahankan praktik gotong royong, kegiatan keagamaan, dan hubungan lintas etnis, meskipun perubahan pola kehidupan perkotaan turut memengaruhi intensitas interaksi sosial. Artikel ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi perkotaan perlu memperhatikan distribusi manfaat ekonomi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan kohesi sosial.*

PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa merupakan bagian dari transformasi ekonomi perkotaan yang berkontribusi terhadap perubahan struktur pekerjaan, pola pendapatan, dan hubungan sosial masyarakat. Ekspansi aktivitas dunia usaha tidak hanya menciptakan peluang investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah, tetapi juga menghasilkan konsekuensi sosial yang berkaitan dengan distribusi manfaat pembangunan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tidak cukup dinilai berdasarkan peningkatan aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana masyarakat di

sekitar kegiatan memperoleh manfaat secara adil. Persoalan tersebut semakin relevan di negara berkembang, termasuk Indonesia, ketika pertumbuhan kawasan ekonomi belum selalu diikuti pemerataan kesejahteraan antarkelompok masyarakat. Hornok & Raeskyesa, (2024). menemukan bahwa pembukaan kawasan ekonomi memiliki hubungan positif dengan ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi, meskipun besaran dampaknya relatif kecil dan dapat berbeda menurut karakteristik daerah. Sementara itu, Sen, (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan pasar kerja di Indonesia tercermin dalam perbedaan pendapatan antara pekerja formal dan informal serta terbatasnya mobilitas pekerja dari kelompok berpendapatan rendah menuju pekerjaan dengan kualitas lebih baik.

Dalam perspektif sosial ekonomi, keberadaan perusahaan di tengah masyarakat dapat dipahami sebagai proses relasi antara aktor ekonomi dan struktur sosial lokal. Perusahaan berperan dalam menciptakan kesempatan kerja, menyediakan sumber pendapatan, serta mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi pendukung. Namun, manfaat tersebut tidak secara otomatis dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Perbedaan tingkat pendidikan, keterampilan, dan posisi sosial ekonomi dapat memengaruhi kemampuan individu dalam memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Sen, (2024) menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia masih memperlihatkan kesenjangan antarkelompok pekerja, terutama berdasarkan tingkat pendidikan dan status pekerjaan formal maupun informal. Selain itu, Gehrke et al., (2025) memperlihatkan bahwa aktivitas investasi dapat menghasilkan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan perkembangan kegiatan ekonomi pendukung melalui keterkaitan rantai nilai. Oleh karena itu, persoalan kesempatan kerja tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang diserap, tetapi juga menyangkut pemerataan akses dan distribusi manfaat ekonomi. Wihardja & Pradana, (2024) juga menegaskan bahwa pendidikan, kualitas pekerjaan, dan lokasi tempat tinggal merupakan faktor yang berkaitan dengan perubahan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan demikian, analisis terhadap aktivitas usaha perlu melampaui indikator penyerapan tenaga kerja dan mempertimbangkan bagaimana peluang ekonomi tersebut terdistribusi di antara masyarakat sekitar.

Selain dimensi ekonomi, hubungan antara dunia usaha dan masyarakat juga ditentukan oleh penerimaan sosial, kepercayaan, dan kualitas keterlibatan masyarakat dalam aktivitas perusahaan. Konsep *social license to operate* (SLO) menjelaskan bahwa keberadaan dan keberlanjutan aktivitas perusahaan tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh penerimaan dan legitimasi sosial dari masyarakat yang terdampak. Breakey et al., (2025) menegaskan bahwa SLO berkaitan dengan penerimaan masyarakat, nilai-nilai lokal, dan legitimasi moral yang mendasari keberadaan suatu aktivitas usaha. Sejalan dengan itu, Otor et al., (2026) menunjukkan bahwa persepsi terhadap manfaat, risiko, dan kepercayaan merupakan faktor penting dalam membentuk penerimaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Otor et al., (2026) juga menemukan bahwa persepsi positif terhadap dampak aktivitas ekonomi serta keterlibatan pemangku kepentingan lokal berkontribusi terhadap penerimaan sosial. Dalam fenomena di Indonesia, Ham, (2025) memperlihatkan bahwa penerapan SLO tidak cukup hanya mengandalkan program tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat yang inklusif dan proses konsultasi yang transparan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa hubungan perusahaan dan masyarakat bukan hubungan yang bersifat satu arah, melainkan proses sosial yang membutuhkan komunikasi, partisipasi, transparansi, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Relasi dunia usaha dan masyarakat juga memiliki dimensi budaya yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan ekonomi perkotaan. Perkembangan aktivitas komersial, mobilitas penduduk, dan meningkatnya intensitas pekerjaan dapat memengaruhi pola interaksi, solidaritas, serta praktik kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Nilai gotong royong, hubungan antaretnis,

kegiatan keagamaan, dan partisipasi dalam aktivitas kemasyarakatan merupakan unsur penting dalam mempertahankan kohesi sosial. Adianto et al., (2024) menunjukkan bahwa nilai dan norma bersama, jaringan sosial, kepercayaan, sikap saling membantu, serta partisipasi dalam kegiatan masyarakat merupakan komponen penting dalam pembentukan modal sosial dan tindakan kolektif. Akan tetapi, perubahan struktur pekerjaan dan orientasi kehidupan perkotaan berpotensi mengubah intensitas interaksi sosial yang sebelumnya terbentuk melalui kedekatan tempat tinggal dan hubungan kekerabatan. Hofstad et al., (2025) menjelaskan bahwa keberlanjutan sosial komunitas perkotaan perlu dipahami melalui keterkaitan antara ketahanan lingkungan permukiman, akses terhadap kebutuhan sehari-hari, dan struktur tata kelola. Dengan demikian, pembangunan ekonomi perkotaan perlu memperhatikan keberlanjutan hubungan sosial dan kapasitas masyarakat dalam mempertahankan nilai budaya di tengah perubahan lingkungan ekonomi.

Meskipun kajian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, ketimpangan ekonomi, dan penerimaan masyarakat terhadap aktivitas usaha telah berkembang, masih diperlukan analisis yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam konteks aktivitas perdagangan dan jasa perkotaan. Sebagian kajian menempatkan distribusi pendapatan sebagai persoalan ekonomi, sedangkan penelitian mengenai penerimaan perusahaan lebih banyak membahas legitimasi sosial dan tanggung jawab korporasi. Sementara itu, perubahan pola interaksi dan keberlanjutan praktik budaya masyarakat sering kali dibahas secara terpisah. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang menghubungkan kesempatan kerja, distribusi manfaat ekonomi, partisipasi masyarakat, dan kohesi sosial dalam satu kerangka analisis. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memahami relasi dunia usaha dan masyarakat melalui keterkaitan antara akses ekonomi, penerimaan sosial, dan keberlanjutan budaya lokal, bukan hanya melalui ukuran pertumbuhan usaha atau kepuasan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan.

Konteks empiris penelitian ini berada di Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat di sekitar kegiatan operasional Showroom Honda PT Sinar Lima Samudra. Berdasarkan dokumen evaluasi lingkungan hidup tahun 2026, kegiatan usaha tersebut mempekerjakan 64 orang tenaga kerja, dengan 17 orang berasal dari Kecamatan Tallo, termasuk 7 orang dari Kelurahan Kalukubodoa. Hasil wawancara terhadap 35 responden menunjukkan bahwa seluruh responden mendukung keberadaan kegiatan usaha karena dinilai membuka peluang pekerjaan dan aktivitas ekonomi. Namun, 4 responden (11%) menyampaikan kekhawatiran mengenai pemerataan kesempatan kerja. Seluruh responden juga mengharapkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perekrutan tenaga kerja. Pada dimensi sosial budaya, kegiatan gotong royong, aktivitas keagamaan, dan perkawinan lintas suku masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Temuan awal tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara penerimaan terhadap aktivitas ekonomi, harapan memperoleh manfaat pembangunan, dan keberlanjutan hubungan sosial masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis isu sosial kontemporer dalam relasi dunia usaha dan masyarakat dengan memusatkan perhatian pada tiga aspek, yaitu dinamika kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, penerimaan serta partisipasi sosial masyarakat terhadap aktivitas usaha, dan keberlanjutan kohesi sosial serta praktik budaya lokal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian sosiologi ekonomi dan sosiologi pembangunan, sekaligus menawarkan perspektif empiris bagi pengembangan tata kelola aktivitas usaha yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial budaya masyarakat perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Creswell., 2017), untuk mengkaji isu sosial kontemporer dalam dinamika sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar aktivitas usaha perkotaan. Penelitian berlokasi di Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada lingkungan sosial masyarakat di sekitar operasional Showroom Honda PT Sinar Lima Samudra. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan fenomena sosial dipahami berdasarkan konteks, pengalaman, persepsi, dan praktik masyarakat (Braun & Clarke, 2025). Data penelitian bersumber dari data lapangan yang kegiatan operasional Showroom Honda. Data tersebut mencakup hasil wawancara dan observasi terhadap 35 responden yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan, serta dokumentasi kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui beberapa tahap, yaitu pengorganisasian data, pembacaan dan penelaahan dokumen, pengelompokan informasi, identifikasi pola temuan, serta interpretasi. Data dikategorikan ke dalam tiga dimensi analisis: (1) sosial ekonomi, meliputi kesempatan kerja, pendapatan, dan peluang usaha; (2) hubungan sosial, meliputi persepsi, partisipasi, kerja sama, dan kohesi sosial; serta (3) budaya, meliputi gotong royong, hubungan antaretnis, dan keberlanjutan kegiatan sosial-keagamaan. Penggunaan kategori tematik membantu menyusun pola dan makna dari data deskriptif (Nicmanis, 2024). Keabsahan interpretasi diperkuat melalui pemeriksaan silang antara informasi wawancara, catatan observasi, dan dokumen pendukung. Prosedur ini diarahkan untuk meningkatkan kredibilitas dan keterlacakan proses analisis, dengan memperhatikan prinsip transparansi dan refleksivitas dalam penelitian kualitatif (Ahmed, 2024; Sankofa, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Aktivitas Usaha dan Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat

Hasil analisis penulis bahwa kehadiran aktivitas dunia usaha di kawasan perkotaan merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan struktur ekonomi masyarakat. Perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa tidak hanya menghasilkan aktivitas ekonomi secara langsung, tetapi juga membentuk hubungan antara sektor usaha formal dengan sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, aktivitas ekonomi tidak berlangsung secara terpisah dari struktur sosial, melainkan tertanam dalam hubungan sosial, jaringan, dan kondisi kelembagaan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan usaha perlu dipahami bukan hanya melalui pertumbuhan kegiatan ekonomi, tetapi juga melalui distribusi kesempatan dan manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan sosial ekonomi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya ekonomi, tetapi juga oleh kepemilikan modal sosial, jaringan hubungan, dan strategi adaptasi kolektif. Alimin Alwi, (2025) menunjukkan bahwa habitus dan strategi bertahan hidup kelompok mahasiswa marginal di Kota Makassar berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya sosial dalam menghadapi keterbatasan struktural. Perspektif ini memperkuat pemahaman bahwa dinamika ekonomi masyarakat perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kapasitas sosial individu dan kelompok dalam mengakses peluang serta mempertahankan kehidupannya.

Temuna hasil observasi di Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, keberadaan Showroom Honda PT Sinar Lima Samudra memperlihatkan hubungan antara aktivitas usaha formal dengan dinamika ekonomi masyarakat perkotaan. Perusahaan mempekerjakan 64 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, 17 orang berasal dari Kecamatan Tallo, termasuk 7 orang yang

berdomisili di Kelurahan Kalukubodoa. Data ini menunjukkan adanya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha, meskipun jumlah pekerja dari kelurahan sekitar masih merupakan bagian terbatas dari keseluruhan tenaga kerja perusahaan. Kondisi tersebut mengartikan bahwa keberadaan perusahaan membuka akses pekerjaan bagi sebagian masyarakat, tetapi belum dapat dianggap mewakili pemerataan kesempatan kerja bagi seluruh penduduk setempat.

Temuan tersebut juga perlu dibaca dengan memperhatikan karakteristik sosial ekonomi masyarakat sekitar. Hasil wawancara terhadap 35 responden menunjukkan bahwa 40% bekerja sebagai wiraswasta atau pelaku usaha, 11% sebagai PNS/TNI/Polri, 26% sebagai karyawan, dan 23% tidak bekerja atau merupakan ibu rumah tangga. Komposisi ini menggambarkan keragaman sumber penghidupan masyarakat yang tidak sepenuhnya bergantung pada sektor pekerjaan formal. Keberadaan kelompok pelaku usaha mandiri dan pekerja informal menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi lokal memiliki struktur yang beragam. Sen (2024) menjelaskan bahwa pasar kerja Indonesia masih memperlihatkan perbedaan posisi dan pendapatan antarkelompok pekerja, terutama antara pekerjaan formal dan berbagai lapisan pekerjaan informal. Dengan demikian, karakteristik pekerjaan masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam memahami kemampuan mereka mengakses peluang ekonomi yang muncul dari perkembangan aktivitas usaha.

Berdasarkan catatan observasi, aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan meliputi warung kopi, bengkel kendaraan, warung makan, jasa pencucian motor dan mobil, usaha fotokopi, serta pedagang kaki lima. Keberadaan berbagai jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sekitar showroom memiliki aktivitas ekonomi yang beragam. Secara sosiologis, kondisi ini dapat dibaca sebagai keterkaitan ekonomi antara usaha formal dan kegiatan ekonomi skala kecil. Aktivitas perusahaan berpotensi menciptakan kebutuhan terhadap barang dan jasa pendukung, sementara pelaku usaha lokal menyediakan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja maupun pengguna kawasan. Widita et al., (2024), melalui penelitian mengenai pola spasial UMKM di 98 wilayah kabupaten dan 4.995 desa di Indonesia, menunjukkan bahwa persebaran usaha kecil dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, infrastruktur digital, rasio pekerjaan terhadap rumah tangga, dan ketercampuran aktivitas usaha. Temuan tersebut memperkuat pemahaman bahwa perkembangan usaha lokal berkaitan dengan kondisi lingkungan dan aksesibilitas ekonomi. Namun, dokumen yang tersedia belum mengukur secara khusus peningkatan omzet atau pendapatan pelaku usaha akibat keberadaan showroom. Dengan demikian, hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikasi keterkaitan ekonomi lokal, bukan bukti langsung peningkatan pendapatan seluruh pelaku usaha.

Dari sisi persepsi masyarakat, hasil wawancara yang dirangkum menunjukkan bahwa seluruh responden (35 orang atau 100%) menyatakan persetujuan terhadap operasional showroom karena dipandang dapat membuka lapangan pekerjaan, menghadirkan peluang ekonomi, dan mendorong perkembangan wilayah. Meskipun demikian, terdapat 4 responden (11%) yang menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan tidak meratanya kesempatan kerja. Harapan masyarakat agar warga setempat memperoleh prioritas dalam proses rekrutmen, baik untuk pekerjaan terampil maupun tidak terampil. Salah satu rumusan harapan kolektif yang menyebutkan bahwa "masyarakat di wilayah studi dapat dilibatkan ... baik sebagai tenaga kerja terampil (skilled) maupun tenaga kerja tidak terampil (non-skilled)." Pernyataan ini merupakan rumusan kolektif, bukan kutipan verbatim dari seorang informan tertentu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap aktivitas usaha berjalan berdampingan dengan tuntutan mengenai keadilan akses dan keterlibatan tenaga kerja lokal.

Persoalan pemerataan manfaat ekonomi juga ditemukan dalam penelitian Hornok & Raeskyesa, (2024), yang menunjukkan bahwa perkembangan kawasan ekonomi di Indonesia dapat

berkaitan dengan peningkatan ketimpangan pendapatan, terutama ketika kelompok masyarakat dengan keterampilan lebih rendah tidak memperoleh manfaat secara proporsional. Gehrke et al., (2025) juga memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan investasi dapat menghasilkan respons pada pasar kerja lokal, termasuk melalui penciptaan usaha kecil dan efek keterkaitan rantai nilai pada sektor jasa. Sementara itu, Wihardja & Pradana, (2024) mengidentifikasi bahwa pendidikan dan lokasi tempat tinggal merupakan faktor yang berkaitan dengan perubahan pendapatan dan ketimpangan di Indonesia. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi dari aktivitas usaha tidak otomatis terdistribusi secara merata, tetapi dipengaruhi oleh kapasitas tenaga kerja, kondisi wilayah, dan akses terhadap peluang ekonomi.

Berdasarkan temuan tersebut, transformasi sosial ekonomi di Kelurahan Kalukubodoa memperlihatkan dua kecenderungan. Pertama, aktivitas usaha formal membuka peluang penyerapan tenaga kerja dan berpotensi memperkuat keterkaitan ekonomi dengan usaha masyarakat sekitar. Kedua, muncul harapan dan perhatian masyarakat terhadap pemerataan akses pekerjaan serta keterlibatan tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, perkembangan aktivitas usaha perkotaan perlu diarahkan pada prinsip inklusi ekonomi melalui transparansi informasi rekrutmen, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, dan penguatan hubungan kemitraan dengan pelaku usaha kecil. Dengan cara tersebut, keberadaan perusahaan dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi kegiatan usahanya sendiri, dan juga dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat di sekitarnya.

Pemerataan Kesempatan Kerja dan Distribusi Manfaat Ekonomi

Salah satu isu sosial kontemporer dalam pembangunan ekonomi perkotaan adalah pemerataan akses terhadap kesempatan kerja dan distribusi manfaat ekonomi. Pertumbuhan aktivitas usaha dapat membuka lapangan pekerjaan, tetapi keberadaan lapangan kerja tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan yang sama. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, persoalan tersebut berkaitan dengan distribusi sumber daya, akses terhadap pekerjaan, serta kemampuan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh manfaat dari perkembangan usaha di lingkungannya.

Data operasional Showroom Honda PT Sinar Lima Samudra menunjukkan bahwa dari 64 tenaga kerja yang bekerja di perusahaan, sebanyak 17 orang berasal dari Kecamatan Tallo. Jumlah tersebut terdiri atas 7 orang dari Kelurahan Kalukubodoa dan 10 orang dari wilayah lain di Kecamatan Tallo. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan akses pekerjaan kepada sebagian penduduk lokal. Namun, apabila dilihat dari keseluruhan tenaga kerja, keterlibatan warga Kelurahan Kalukubodoa masih relatif terbatas. Kondisi ini menjadi penting karena kedekatan geografis masyarakat dengan lokasi usaha tidak selalu menjamin prioritas dalam memperoleh pekerjaan.

Hasil wawancara terhadap 35 responden memperlihatkan adanya dukungan yang kuat terhadap operasional showroom. Seluruh responden (100%) menyatakan setuju karena aktivitas usaha tersebut dipandang dapat membuka lapangan pekerjaan, memberikan peluang ekonomi, dan mendorong perkembangan wilayah. Akan tetapi, sebanyak 4 responden (11%) menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan tidak meratanya kesempatan kerja. Temuan ini memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat terhadap keberadaan usaha berjalan berdampingan dengan harapan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih adil.

Harapan tersebut terlihat dalam hasil wawancara yang mengatakan bahwa seluruh responden

menginginkan agar masyarakat sekitar dilibatkan dalam kegiatan operasional perusahaan, baik sebagai tenaga kerja terampil (*skilled*) maupun tidak terampil (*non-skilled*). Salah satu rumusan harapan adalah "agar lapangan pekerjaan merata" dan masyarakat lokal memperoleh kesempatan untuk direkrut. Selain itu, masyarakat menyarankan agar informasi penerimaan tenaga kerja terlebih dahulu disampaikan kepada warga sekitar. Pernyataan tersebut merupakan rumusan jawaban kolektif, bukan transkrip verbatim dari satu informan tertentu.

Dari sisi observasi, dokumen mengidentifikasi keberadaan berbagai aktivitas ekonomi di sekitar lokasi, seperti warung kopi, bengkel kendaraan, warung makan, jasa pencucian kendaraan, usaha fotokopi, dan pedagang kaki lima. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki sumber penghidupan yang beragam, baik melalui pekerjaan formal maupun usaha mandiri. Keberadaan showroom berpotensi memperluas keterkaitan ekonomi dengan kegiatan usaha kecil tersebut. Namun, manfaat tidak langsung berupa peningkatan pendapatan pelaku usaha belum dapat dipastikan karena belum tersedia pengukuran perubahan omzet sebelum dan sesudah operasional perusahaan.

Temuan penelitian ini relevan dengan Hornok & Raeskyesa, (2024), yang menunjukkan bahwa perkembangan kawasan ekonomi di Indonesia dapat berkaitan dengan peningkatan ketimpangan pendapatan, antara lain karena kelompok pekerja tidak terampil berpotensi memperoleh manfaat lebih kecil. Senada dengan itu, Gehrke et al., (2025) menunjukkan bahwa investasi dan perubahan struktur industri dapat menghasilkan dampak ketenagakerjaan lokal, termasuk melalui keterkaitan rantai produksi dan sektor jasa. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa manfaat ekonomi perlu dilihat melalui hubungan antara penciptaan pekerjaan dan kemampuan masyarakat lokal mengakses peluang yang tersedia.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerataan kesempatan kerja di sekitar Showroom Honda bukan semata-mata persoalan jumlah warga lokal yang diterima bekerja, melainkan juga menyangkut transparansi rekrutmen, kesesuaian keterampilan, dan akses informasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan mekanisme rekrutmen yang terbuka, menyampaikan informasi lowongan melalui pemerintah kelurahan, serta mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat setempat. Langkah tersebut dapat memperkuat inklusi ekonomi dan membangun hubungan yang lebih seimbang antara dunia usaha dan masyarakat lokal.

Perubahan Pola Interaksi Sosial dan Kohesi Masyarakat

Perkembangan aktivitas ekonomi perkotaan dapat memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat melalui perubahan mobilitas, penggunaan waktu, dan orientasi kehidupan sehari-hari. Meningkatnya aktivitas pekerjaan dan tuntutan ekonomi berpotensi mengubah intensitas hubungan antarwarga yang sebelumnya dibangun melalui pertemuan langsung dan kegiatan kolektif. Dalam perspektif sosiologi, perubahan tersebut tidak selalu menghilangkan solidaritas sosial, tetapi dapat mengubah bentuk, ruang, dan mekanisme masyarakat dalam mempertahankan hubungan sosial.

Hasil observasi di Kelurahan Kalukubodoa menunjukkan bahwa kerja sama sosial masih berlangsung dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Bentuknya meliputi kerja bakti membersihkan lingkungan, perbaikan fasilitas umum, penyelenggaraan pesta perkawinan, kegiatan sosial ketika terjadi kematian, serta aktivitas keagamaan seperti perayaan Idulfitri, Iduladha, dan Maulid Nabi. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa ruang interaksi sosial masyarakat tidak hanya terbentuk melalui hubungan bertetangga, tetapi juga melalui keterlibatan bersama dalam kegiatan yang memiliki makna sosial dan budaya. Temuan wawancara terhadap 35 responden memperkuat kondisi tersebut. Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa kegiatan bakti sosial dan kerja sama masyarakat masih berlangsung. Sebanyak 35 responden (100%) juga menyatakan

bahwa perkawinan lintas suku telah sering terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, dokumen mencatat bahwa tidak terdapat konflik yang berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja. Temuan ini menunjukkan adanya praktik kehidupan bersama yang relatif terbuka, terutama melalui hubungan sosial sehari-hari dan pembauran antarkelompok etnis. Masyarakat Kelurahan Kalukubodoa sendiri digambarkan memiliki latar belakang etnis yang beragam, antara lain Bugis, Makassar, Mandar, dan Jawa.

Meskipun demikian, hasil pengamatan mengidentifikasi adanya kecenderungan penurunan praktik gotong royong dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Temuan tersebut dapat diperkuat oleh penelitian (Alwi et al., 2024) mengenai solidaritas sosial masyarakat diaspora Wadiabero-Haiya. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa solidaritas sosial dibangun melalui hubungan sosial, pemeliharaan nilai budaya, dan keterlibatan dalam kepentingan kolektif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kohesi sosial tidak hanya bergantung pada kedekatan antarindividu, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mempertahankan jaringan hubungan dan praktik kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesibukan pekerjaan dan aktivitas masing-masing individu disebut sebagai salah satu kondisi yang memengaruhi kedalaman hubungan sosial. Artinya, keberlangsungan kegiatan kolektif belum tentu menunjukkan bahwa intensitas interaksi dan kedekatan sosial masyarakat sepenuhnya tidak mengalami perubahan. Hal ini memperlihatkan adanya dinamika antara keberlanjutan solidaritas tradisional dan perubahan pola kehidupan masyarakat perkotaan. Temuan tersebut sejalan dengan Adianto et al., (2024), yang menjelaskan bahwa modal sosial masyarakat perkotaan terbentuk melalui nilai bersama, jaringan sosial, saling membantu, kepercayaan, serta partisipasi warga. Hofstad et al., (2025) juga menekankan bahwa keberlanjutan sosial komunitas memerlukan ketahanan lingkungan permukiman, jaringan sosial yang inklusif, dan keterlibatan berbagai aktor. Sementara itu, Syamsidar et al., (2026), melalui penelitian terhadap masyarakat perkotaan di Makassar, menunjukkan bahwa komunikasi antarbudaya dan adaptasi sosial berkaitan positif dengan kohesi sosial dan keterlibatan masyarakat.

Dengan demikian, kohesi sosial di Kelurahan Kalukubodoa adalah hasil interaksi, kerja sama, dan adaptasi antarkelompok dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan aktivitas usaha perkotaan perlu ditempatkan dalam aspek keberlanjutan hubungan sosial tersebut. Perusahaan, pemerintah setempat, dan masyarakat dapat memperkuat kohesi melalui kegiatan sosial bersama, komunikasi terbuka, serta dukungan terhadap aktivitas kemasyarakatan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan manfaat material, tetapi juga tetap mendukung solidaritas dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat lokal.

Keberlanjutan Nilai Budaya dan Adaptasi Masyarakat Perkotaan

Perubahan sosial ekonomi masyarakat perkotaan tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebudayaan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan kawasan perdagangan dan jasa menghadirkan perubahan mobilitas penduduk, diversifikasi pekerjaan, serta intensifikasi interaksi antarkelompok sosial. Dalam perspektif sosiologi budaya, perubahan tersebut tidak selalu mengakibatkan hilangnya nilai budaya lokal, tetapi dapat mendorong penyesuaian bentuk, fungsi, dan mekanisme pewarisannya. Oleh karena itu, keberlanjutan budaya perlu dipahami sebagai proses dinamis yang mempertemukan tradisi, perubahan sosial, dan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Berdasarkan haasil observasi, masyarakat Kelurahan Kalukubodoa masih mempertahankan berbagai praktik kebersamaan, seperti gotong royong, kerja bakti, perbaikan fasilitas umum, penyelenggaraan pesta perkawinan, kegiatan kedukaan, serta perayaan hari besar keagamaan.

Kegiatan tersebut menjadi ruang reproduksi nilai solidaritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kolektif. Partisipasi warga dalam kegiatan kemasyarakatan memperlihatkan bahwa nilai budaya tidak hanya diwariskan melalui pengetahuan atau simbol, tetapi juga dipertahankan melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang.

Dimensi sosial-keagamaan juga memiliki peran dalam mempertahankan norma dan perilaku kolektif masyarakat. Alwi, (2025) melalui kajian mengenai dimensi sosial-keagamaan dalam praktik pembuangan sampah di Indonesia, menunjukkan pentingnya memahami hubungan antara nilai keagamaan, budaya, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa praktik budaya dan keagamaan tidak hanya menjadi bagian dari identitas masyarakat, tetapi juga dapat berkaitan dengan pembentukan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bersama.

Keberagaman etnis masyarakat, terutama Bugis, Makassar, Mandar, dan Jawa, turut membentuk dinamika adaptasi budaya. Data wawancara yang dirangkum menunjukkan bahwa seluruh 35 responden (100%) menyatakan perkawinan lintas suku sering terjadi di lingkungan mereka. Fenomena ini mengindikasikan adanya ruang interaksi antaretnis yang memungkinkan pembauran sosial dan negosiasi identitas budaya. Namun, perkawinan lintas suku tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh hubungan antarkelompok berlangsung tanpa ketegangan.

Di sisi lain, dokumen tersebut mencatat kecenderungan berkurangnya intensitas gotong royong dibandingkan masa sebelumnya. Kesibukan pekerjaan, perubahan penggunaan waktu, dan pengaruh budaya yang lebih luas merupakan faktor yang disebut berkaitan dengan kondisi tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan tradisi tidak selalu menjamin kesinambungan tingkat partisipasi masyarakat. Perubahan tersebut juga tidak dapat secara langsung diatribusikan kepada operasional showroom karena tidak tersedia bukti hubungan sebab-akibat. Dalam konteks keberlanjutan sosial perkotaan, Hofstad et al., (2025) menekankan pentingnya jaringan sosial, inklusivitas, dan kapasitas komunitas dalam menghadapi perubahan. Adianto et al., (2024) menunjukkan relevansi modal sosial dan tindakan kolektif dalam kehidupan lingkungan permukiman perkotaan. Sementara itu, Syamsidar et al., (2026) menggarisbawahi peran komunikasi antarbudaya dan adaptasi sosial dalam memperkuat kohesi masyarakat multikultural.

Dengan demikian, keberlanjutan budaya masyarakat Kalukubodoa memerlukan keseimbangan antara pelestarian nilai positif dan penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi perkotaan. Pemerintah setempat, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mendukung kegiatan sosial-keagamaan, menyediakan ruang pertemuan warga, serta memperkuat partisipasi lintas generasi dan etnis. Pendekatan tersebut menempatkan pembangunan ekonomi sebagai proses yang perlu berjalan berdampingan dengan pemeliharaan identitas budaya, solidaritas, dan keberlanjutan kehidupan komunitas.

Relasi Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Hubungan antara dunia usaha dan masyarakat merupakan salah satu persoalan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya berperan sebagai aktor ekonomi yang menjalankan aktivitas perdagangan dan jasa, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan sosial tempat kegiatan usahanya berlangsung. Keberadaan perusahaan dapat menciptakan peluang ekonomi, membuka kesempatan kerja, dan mendorong tumbuhnya aktivitas usaha pendukung. Namun, manfaat tersebut perlu diikuti dengan perhatian terhadap kebutuhan, harapan, dan kepentingan masyarakat lokal. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keberhasilan aktivitas usaha tidak hanya ditentukan oleh kinerja ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan membangun hubungan sosial yang adil dan berkesinambungan.

Hasil kajian di Kelurahan Kalukubodoa menunjukkan bahwa masyarakat memiliki penerimaan positif terhadap keberadaan operasional Showroom Honda PT Sinar Lima Samudra. Berdasarkan data, seluruh 35 responden (100%) menyatakan mendukung keberadaan kegiatan usaha tersebut. Dukungan ini berkaitan dengan harapan terbukanya lapangan pekerjaan, berkembangnya aktivitas ekonomi, dan meningkatnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari kegiatan usaha. Keberadaan showroom juga berlangsung di tengah aktivitas ekonomi lokal, seperti warung makan, warung kopi, bengkel kendaraan, jasa pencucian kendaraan, usaha fotokopi, dan pedagang kaki lima. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya potensi keterkaitan antara kegiatan perusahaan dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Namun, data yang tersedia belum mengukur secara langsung peningkatan pendapatan atau omzet usaha lokal akibat operasional showroom.

Penerimaan positif tersebut juga disertai harapan mengenai pemerataan kesempatan kerja. Temuan mencatat bahwa dari 64 tenaga kerja yang dipekerjakan, sebanyak 17 orang berasal dari Kecamatan Tallo, termasuk 7 orang dari Kelurahan Kalukubodoa. Selain itu, 4 responden (11%) menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan belum meratanya kesempatan memperoleh pekerjaan. Seluruh responden juga mengharapkan agar masyarakat lokal memperoleh prioritas dan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan, baik pada posisi terampil maupun tidak terampil. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap perusahaan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan investasi, tetapi juga dengan persepsi mengenai keadilan distribusi manfaat ekonomi.

Dalam kajian tanggung jawab sosial perusahaan, Ho et al., (2024) menjelaskan pentingnya hubungan antara praktik tanggung jawab sosial dan penerimaan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan. Sementara itu, Hofstad et al., (2025) menekankan bahwa keberlanjutan sosial komunitas memerlukan inklusivitas, partisipasi, dan keterlibatan berbagai aktor dalam pembangunan. Dengan demikian, relasi dunia usaha dan masyarakat perlu dikembangkan melalui komunikasi terbuka, transparansi rekrutmen, penguatan kapasitas tenaga kerja lokal, serta dukungan terhadap kegiatan sosial masyarakat. Perusahaan, pemerintah, dan warga memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial, kohesi masyarakat, dan keberlanjutan budaya lokal. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan kawasan komersial tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Aktivitas dunia usaha di kawasan perkotaan merupakan bagian dari transformasi sosial ekonomi yang memiliki implikasi terhadap kehidupan masyarakat lokal. Kajian di Kelurahan Kalukubodoa menunjukkan bahwa operasional Showroom Honda PT Sinar Lima Samudra memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja dan perkembangan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Namun, perkembangan tersebut juga memperlihatkan persoalan pemerataan manfaat ekonomi, terutama berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap prioritas tenaga kerja lokal dan akses yang lebih adil terhadap kesempatan kerja. Pada dimensi sosial budaya, masyarakat masih mempertahankan praktik gotong royong, kegiatan keagamaan, dan hubungan lintas etnis sebagai bagian dari mekanisme pemeliharaan kohesi sosial. Meskipun demikian, perubahan pola kehidupan perkotaan menjadi tantangan bagi keberlanjutan intensitas interaksi sosial dan praktik kebersamaan. Artikel ini menegaskan bahwa isu sosial kontemporer dalam pembangunan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut pemerataan kesempatan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan nilai budaya. Oleh karena itu,

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu mengintegrasikan kepentingan dunia usaha dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal.

DAFTAR REFERENSI

Adianto, J., Gabe, R. T., & Hernowo, B. (2024). Pandemic at the Gates: The Improvement of Social Capital and Collective Efficacy in Neighbourhoods of the Greater Jakarta Metropolitan Area. *Environment and Urbanization ASIA*, *15*(1), 106–120. https://doi.org/10.1177/09754253241234698

Ahmed, S. K. (2024). The pillars of trustworthiness in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, *2*, 100051. https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100051

Alwi, A. (2025a). Faith , Culture , and the River : Socio-Religious Dimensions of Waste Disposal Practices in Indonesia. *Reflektif, Jurnal Sosiologi*, *20*(1), 161–184.

Alwi, A. (2025b). Habitus dan Strategi Bertahan Hidup Mahasiswa Marginal: Kajian Sosiologis Terhadap Penghuni Asrama Sulawesi Tenggara di Kota Makassar. *Jurnal Perspektif*, *8*(3), 383–393. https://doi.org/10.24036/perspektif.v8i3.1280

Alwi, A., Ram, S. W., & Dinda, L. O. (2024). Social Solidarity of The Wadiabero-Haiya People Diaspora. *International Journal of Qualitative Research*, *4*(2), 135–142. https://doi.org/10.47540/ijqr.v4i2.1242

Braun, V., & Clarke, V. (2025). Reporting guidelines for qualitative research: a values-based approach. *Qualitative Research in Psychology*, *22*(2), 399–438. https://doi.org/10.1080/14780887.2024.2382244

Breakey, H., Wood, G., & Sampford, C. (2025). Understanding and defining the social license to operate: Social acceptance, local values, overall moral legitimacy, and 'moral authority.' *Resources Policy*, *102*, 105488. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105488

Creswell., J. W. (2017). Qualitative inquiry and research design : choosing among five approaches - 3rd edition. In *Экономика Региона*.

Gehrke, E., Genthner, R., & Kis-Katos, K. (2025). Regulating manufacturing FDI: Local labor market responses to a protectionist policy in Indonesia. *Journal of Development Economics*, *177*, 103563. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2025.103563

Ham, U. (2025). The Implementation of the Social Licence to Operate (SLO) Concept in Nickel Mining Governance in Kolaka Regency. *PCD Journal*, *13*(1), 153–192. https://doi.org/10.22146/pcd.v13i1.16659

Ho, S. S. H., Oh, C. H., & Shapiro, D. (2024). Can Corporate Social Responsibility Lead to Social License? A Sentiment and Emotion Analysis. *Journal of Management Studies*, *61*(2), 445–476. https://doi.org/10.1111/joms.12863

Hofstad, H., Dahl, C., Følling, K., Mouratidis, K., Olsen, B. O., Sagen, S. B., & Zeiner, H. H. (2025). Community Social Sustainability: Unpacking the Concept for Urban Governance and Planning. *Sustainable Development*, *33*(3), 3970–3984. https://doi.org/10.1002/sd.3327

Hornok, C., & Raeskyesa, D. G. S. (2024). Economic zones and local income inequality: Evidence from Indonesia. *The Journal of Economic Inequality*, *22*(1), 69–100. https://doi.org/10.1007/s10888-023-09581-x

Nicmanis, M. (2024). Reflexive Content Analysis: An Approach to Qualitative Data Analysis, Reduction, and Description. *International Journal of Qualitative Methods*, *23*. https://doi.org/10.1177/16094069241236603

Otor, S., Bice, S., & Henderson, H. (2026). Social Licence to Operate and Major Infrastructure: A Social Exchange Theory Approach to Modelling Drivers of Community Acceptance.

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, *33*(3), 3225–3246. https://doi.org/10.1002/csr.70317

Sankofa, N. (2023). Critical method of document analysis. *International Journal of Social Research Methodology*, *26*(6), 745–757. https://doi.org/10.1080/13645579.2022.2113664

Sen, K. (2024). Broken Ladders? Labour Market Inequality in Indonesia and India. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *60*(2), 161–191. https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2389593

Syamsidar, S., Rusdiah, R., Syamsu, A., & Wahyuni, W. (2026). Negotiating Social Cohesion in Multicultural Urban Indonesia: Interaction and Adaptation. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *13*(3), 411–435. https://doi.org/10.66815/ejecs/2947

Widita, A. A., Lechner, A. M., & Widyastuti, D. T. (2024). Spatial patterns and drivers of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) within and across Indonesian cities: Evidence from highly granular data. *Regional Science Policy & Practice*, *16*(11), 100137. https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100137

Wihardja, M. M., & Pradana, A. T. (2024). Examining the drivers of changes in mean earnings and earnings inequality in Indonesia. *Asian Economic Journal*, *38*(2), 232–255. https://doi.org/10.1111/asej.12332